

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) bagi Orang Dengan Kecacatan (ODK) tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat baik secara perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan bagi orang dengan kecacatan yang dilaksanakan atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial.

Partisipasi secara konseptual merupakan alat dan tujuan untuk mencapai suatu perubahan, berfungsi sebagai alat penggerak dan pengarah proses perubahan sosial berencana, demokratis dalam sistem kehidupan sosial ekonomi dan politik yang berazaskan pemerataan keadilan sosial, pelaksanaan serta hasil-hasil pembangunan, sehingga dapat memupuk harga diri, kepercayaan, kesadaran, dan solidaritas sosial masyarakat.

Dalam konteks kecacatan, partisipasi masyarakat merupakan kata kunci keberhasilan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial khususnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi orang dengan kecacatan. Kecacatan atau disabilitas merupakan produk dari lingkungan sosial yang diskriminatif karena perilaku dan hambatan yang menghalangi mereka berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar persamaan

dengan orang lain sebagian besar disebabkan karena faktor lingkungan sosial. Padahal di satu sisi, orang dengan kecacatan memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan terlebih terkait pemenuhan hak-hak dan kebutuhan mereka.

Orang dengan kecacatan (ODK) mempunyai kewajiban dan hak sama sebagaimana layaknya warga Negara lain dalam berbagai sektor kehidupan. Namun karena keterbatasan yang mereka miliki, berbagai fasilitas publik dan infrastruktur perlu disesuaikan atau diadaptasikan sesuai kondisi keterbatasan/ kecacatan yang dimilikinya, sehingga aktivitas dan mobilitas mereka tidak mengalami hambatan dan tidak tergantung kepada orang lain.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bahkan kalangan-kalangan tertentu masih mempunyai pemikiran, anggapan, penilaian, sikap, dan perlakuan yang tidak proporsional terhadap orang dengan kecacatan. Mereka dipandang sebagai kelompok yang perlu dikasihani, merepotkan, sehingga kerap mendapatkan berbagai bentuk diskriminasi atas dasar ras, usia, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul sosial, hak milik, atau status lainnya. Orang dengan kecacatan (ODK) kerap menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara di semua sektor kehidupan. Selain itu stigma dan labeling masyarakat juga melekat pada mereka sebagai kelompok yang perlu dikasihani, serba ketergantungan, tidak berdaya bahkan menjijikan. Hal lain yang turut memperparah kondisi itu fakta

menunjukkan bahwa mayoritas orang dengan kecacatan hidup dalam kemiskinan.

Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson (1990), mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi oleh orang dengan kecacatan (ODK) adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah di atas.

Berdasarkan berbagai gambaran tentang permasalahan orang dengan kecacatan, terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi tidak sebatas pada orang dengan kecacatan itu sendiri melainkan terkait dengan keluarga dan masyarakat. Jadi, orang dengan kecacatan, keluarga dan masyarakat adalah sasaran dari pembinaan dan pendidikan dalam rangka mengatasi berbagai hambatan atau masalah sosial yang mereka alami.

Adam dan Soifer dalam Browne (1982) mengemukakan adanya berbagai kebutuhan dari orang dengan kecacatan dan keluarganya. Orang dengan kecacatan (ODK) membutuhkan dukungan emosional, kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuann berperilaku secara bertahap, supaya mendapatkan kembali pengetahuan mengenai pengendalian diri dan emosional yang mereka alami. Selanjutnya keluarga dan anggotanya perlu untuk memahami bagaimana membina hubungan satu sama lain

dalam keluarga yang di dalamnya terdapat orang dengan kecacatan. Keluarga perlu untuk mengetahui siapa yang mengambil alih peran dan fungsi, bagaimana anggota keluarga dan ODK merasakan perubahan-perubahan dan bagaimana keluarga sebagai suatu unit ekonomi dan sosial telah merubah keberfungsian.

Masalah orang dengan kecacatan sesungguhnya terletak pada lingkungan dimana ia berada. Lingkungan sosial tidak memberikan kesempatan dan aksesibilitas terhadap mereka untuk melaksanakan berbagai peran dan tugas perkembangannya. Orang dengan kecacatan (ODK) sebagai individu yang keadaannya berbeda dari kebanyakan individu pada umumnya, kehadirannya ditolak oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan orang dengan kecacatan terlalu lemah tidak mungkin dapat berkontribusi terhadap kelompoknya. Mereka yang berbeda yaitu orang dengan kecacatan disingkirkan, tidak mendapatkan kasih sayang dan kontak sosial yang bermakna, keberadaan mereka tidak diakui oleh masyarakatnya.

Berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh orang dengan kecacatan, maka diperlukan berbagai upaya untuk menghargai potensi dan kontribusi orang dengan kecacatan untuk keseluruhan kesejahteraan dan keragaman masyarakat, hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta partisipasinya sehingga menghasilkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan.

Dalam rangka menanggulangi masalah-masalah tersebut diatas, perlu digunakan pendekatan alternatif yang menempatkan masyarakat

sebagai titik sentral pembangunan kesejahteraan sosial. Karena itu, perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal (Craig dan Mayo, 1995). "Partisipasi masyarakat merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat". Salah satu agen internasional, Bank dunia misalnya, percaya bahwa "partisipasi masyarakat di dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat peduli melalui upaya membangkitkan semangat. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus dan sekaligus isu sentral pembangunan saat ini.

Partisipasi masyarakat di negara-negara dunia ketiga merupakan strategi efektif untuk mengatasi masalah urbanisasi dan industrialisasi (Craig dan Mayo, 1995). Bank dunia meletakkan pemberdayaan sebagai salah satu objek utama dalam partisipasi masyarakat (Paul, 1987). Sementara itu, strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah. Brudtland menyimpulkan bahwa jaminan pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat (Craig dan Mayo, 1995). Clarke menyatakan bahwa "partisipasi masyarakat merupakan kunci partisipasi efektif untuk

mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat”.

Dalam bidang pelayanan sosial, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai produk hukum dan kebijakan untuk memberikan landasan hukum bagi warga negara yang mengalami kecacatan untuk mengakses berbagai fasilitas dan infrastruktur transportasi, gedung pelayanan publik, sehingga mobilitas mereka tidak terhambat dan mengurangi ketergantungan kepada orang lain. Teknologi adaptif yang memungkinkan mereka melaksanakan mobilitas dan berbagai aktivitas kehidupan tanpa terhambat dengan keterbatasan yang dimilikinya. Struktur bangunan dan berbagai infrastruktur menganut penerapan *universal design* agar dapat diakses oleh orang dengan kecacatan tanpa bantuan orang lain.

Pelayanan rehabilitasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan yang bersifat kelembagaan atau sistem panti (*Institutional Based*) maupun rehabilitasi yang berbasis masyarakat (*Community Based*). Kegiatan rehabilitasi melalui pendekatan berbasis masyarakat kemudian dikembangkan menjadi pelayanan sistem non panti, artinya pelayanan rehabilitasi yang diselenggarakan di luar panti yang dikenal dengan sebutan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) atau *Community Based Rehabilitation*.

Berkaitan dengan berbagai permasalahan sosial yang dialami oleh orang dengan kecacatan (ODK) maka proses pemberdayaan orang dengan kecacatan sebagaimana fokus dari penelitian ini dilaksanakan

melalui Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yaitu masyarakat merupakan pelopor dan pelaksana rehabilitasi sosial dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di masyarakat, serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan dalam skala besar mengenai kecacatan dalam rehabilitasi kepada orang-orang cacat, anggota keluarga, anggota masyarakat, sekaligus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembuatan keputusan, dan evaluasi program.

Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung merupakan salah satu desa yang dijadikan lokasi praktikum mahasiswa STKS Bandung jurusan Rehabilitasi Sosial tahun akademik 2008/2009. Kegiatan praktikum dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, praktik Pengenalan dan Pemahaman Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan selama satu bulan penuh. Tahap kedua, dengan jumlah waktu dan lokasi yang sama mahasiswa melakukan praktik Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan RBM. Target kegiatan praktikum tahap kedua ini, bahwa di setiap desa yang dijadikan lokasi praktikum terbentuk suatu wadah atau lembaga yang diberi nama RBM. RBM ini berfungsi sebagai wahana kegiatan penyantunan dan pengentasan masalah-masalah sosial lokal dan media partisipasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial khususnya orang dengan kecacatan.

Hasil pendataan mahasiswa tentang jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Desa Cigentur diantaranya terdapat 35 warga dikategorikan orang dengan kecacatan, yaitu cacat tubuh, cacat mental, cacat rungu wicara, cacat netra, dan tuna grahita. Keadaan kehidupan mereka secara umum tergolong tidak mampu karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sangat tergantung pada bantuan keluarga ataupun pihak lain. Oleh karena itu, salah satu fungsi RBM yang dibentuk oleh mahasiswa adalah menangani masalah-masalah dialami oleh orang dengan kecacatan dengan mendayagunakan sumber daya lokal atau apa yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Tindak lanjut dari program ini, sejumlah pengurus RBM telah mendapatkan *capacity building* dari tim dosen STKS melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta program lainnya dari Kementerian Sosial RI.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini kami ingin mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dalam mendukung program RBM di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Berangkat dari hasil wawancara dengan sejumlah pengurus, masih banyak ditemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan keberadaan RBM. Masalah yang dirasakan cukup menonjol terkait keterbatasan sumber daya meliputi sumber daya manusia, dana, fasilitas dan rendahnya dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung merupakan faktor yang menentukan pencapaian tujuan RBM. Seperti diketahui, RBM merupakan salah satu model yang yang diterapkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan

kesejahteraan sosial diantaranya masalah-masalah sosial akibat dari kecacatan yang akhir-akhir ini menunjukkan indikasi meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sedangkan di satu sisi pemerintah dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut: "Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanganan Orang Dengan Cacatan (ODK) melalui Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?". Pertanyaan penelitian ini dijabarkan pada sub-sub problematik, sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik responden ?
2. Bagaimana keikutsertaan responden dalam identifikasi kebutuhan dan potensi ODK serta keluarganya di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana keikutsertaan responden dalam penyusunan program kerja RBM di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ?
4. Bagaimana keikutsertaan responden dalam pelaksanaan program-program RBM di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ?
5. Bagaimana keikutsertaan responden dalam evaluasi penanganan ODK melalui RBM di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ?

C. Asumsi-Asumsi

Asumsi adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pedoman atau pijakan berpikir dalam kegiatan penelitian ini. Adapun asumsi-asumsi yang mendasari kegiatan penelitian, sebagai berikut:

1. Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang akan melahirkan adanya pembagian wewenang, tanggung jawab, dan manfaat.
2. Keberhasilan pelayanan sosial dan pembangunan masyarakat desa, sangat tergantung pada partisipasi aktif warga masyarakat itu sendiri.
3. Seseorang bisa menemukan dirinya sendiri karena keterlibatannya secara sadar ke dalam proses interaksi sosial di masyarakat melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain.
4. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan tidak hanya secara jasmaniah, tetapi keterlibatan dari segi mental dan perasaan.
5. Partisipasi berarti keterlibatan dalam hal proses pengambilan keputusan, menemukan kebutuhan, dan menunjukkan kebutuhan dan prioritas.
6. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat serta pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program rehabilitasi berbasis masyarakat.

7. Pelaksanaan program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dalam mengatasi masalah orang dengan kecacatan yang ada di lingkungannya akan membantu mengembalikan keberfungsian sosial orang dengan kecacatan sesuai dengan kemampuannya.
8. Keberfungsian sosial orang dengan kecacatan akan mempengaruhi pandangan negatif masyarakat terhadap orang dengan kecacatan yang ada di lingkungannya
9. Keberfungsian sosial orang dengan kecacatan dan pandangan yang positif dari masyarakat terhadap orang dengan kecacatan akan berpengaruh pada persamaan hak dan kewajiban orang dengan kecacatan sebagaimana layaknya warga Negara lain dalam berbagai sektor kehidupan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Karakteristik responden
2. Keikutsertaan responden dalam identifikasi kebutuhan dan potensi orang dengan kecacatan serta keluarganya.
3. Keikutsertaan responden dalam penyusunan program kerja RBM.
4. Keikutsertaan responden dalam pelaksanaan program-program RBM.
5. Keikutsertaan responden dalam evaluasi RBM.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan konsep pekerjaan sosial khususnya yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penanganan orang dengan kecacatan melalui Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan orang dengan kecacatan khususnya melalui program-program yang dikelola oleh RBM. Disamping itu, melalui penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan berbagai konsep yang terkait dengan penanganan orang dengan kecacatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partisipasi

1. Definisi/pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Banyak definisi mengenai partisipasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli, seperti pendapat Allport yang dikutip oleh Sastroputro dalam Suciati (2006) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang baik dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas, tetapi ada keterlibatan pikiran dan perasaan. Sedangkan menurut Keith Davis yang dikutip oleh Sastroputro dalam Suciati (2006) "*Participation is defined as a mental and emotional involved at a person in a group situation which encourages then contribute to group goal and share responsibility in them*". (Partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya). Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Partisipasi menurut Ramos dan Roman yang dikutip oleh Yeung dan Mc.Gee dalam Suciati (2006) Partisipasi masyarakat berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu. Dalam hal ini terdapat

pendelegasian wewenang dari pemerintah dan masyarakat dalam aktivitas tertentu.

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Menurut Keith Davis partisipasi didefinisikan sebagai berikut: Partisipasi masyarakat keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi menurut Isbandi (2007: 27) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan

sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya. Konsep partisipasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju dalam Suciati, 2006). Menurut Conyers dalam Suciati (2006) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila